

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PENGGUNA JALAN LALU-LINTAS YANG RUSAK
DI KABUPATEN JOMBANG**

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

zuhdanzamzami@gmail.com

ABSTRACT

By seeing the frequent occurrence of traffic accidents on highways, whether on district highways, provincial highways or national highways, and most people, especially those who experience accidents, where the cause is because the highway is damaged, do not know what to do regarding the government's legal responsibility for victims of road accidents caused by damaged roads.

On this occasion the author would like to discuss the importance of legal protection for people who experience traffic accidents due to damaged roads. The background of this study is traffic accidents due to damaged roads, where these accidents often occur to everyone, especially motorcyclists, especially in the Jombang Regency area of East Java Province.

The main problem in this study is, what legal provisions can be used to provide legal protection for people who experience accidents due to damaged roads, and what factors are obstacles in providing legal protection for victims of traffic accidents. The approach method in this study uses normative law, this study focuses on normative law and secondary data as the main data and uses primary data as supporting data. The data sources in this study were obtained through literature reviews and field studies. Both data were processed using qualitative analysis. Based on the analysis that has been carried out by the author, it can be concluded as follows: the legal provisions that provide legal protection for road users who experience accidents due to damaged roads are the 1945 Constitution and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation, and the obstacles in providing legal protection for victims of traffic accidents are the lack of police officers, the lack of facilities and infrastructure that support police activities, and the low awareness of victims to report accidents in order to obtain legal protection from the government.

Keywords: *Road Officer's Responsibility to Traffic Accident Victims Due to Damaged Roads.*

ABSTRAK

Dengan melihat sering terjadinya peristiwa laka lantas di jalan raya, baik itu di jalan raya kabupaten, jalan raya provinsi maupun jalan raya nasional, dan kebanyakan masyarakat terutama yang mengalami kecelakaan, dimana penyebabnya adalah karena jalan raya yang rusak tidak tahu apa yang harus dilakukan terkait pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban kecelakaan jalan raya yang diakibatkan oleh jalan yang rusak.

Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Latar belakang penelitian ini adalah kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, dimana kecelakaan tersebut sering terjadi pada semua orang, terutama pada pengendara sepeda motor, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada hukum normatif dan data sekunder sebagai data utama serta menggunakan data primer sebagai pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dan studi lapangan. Kedua data tersebut diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya jumlah anggota kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepolisian, dan rendahnya kesadaran korban untuk menginformasikan kecelakaan agar mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Akibat Jalan Rusak*